



## Potensi Penyimpangan Rp 1,2 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) tak hanya melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan UPS (*uninterruptible power supply*), printer 3 dimensi, pemindai (*scanner*), dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah yang dibiayai dari APBD DKI 2014.

Firdaus Ilyas, dari Badan Pekerja ICW, mengatakan pihaknya juga melaporkan dugaan korupsi peningkatan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI tahun anggaran 2014.

"Pengadaan UPS itu merupakan bagian kecil dari ribuan pengadaan barang dan jasa pada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI," ujar Firdaus di gedung KPK, kemarin.

Berdasarkan data daftar penerima anggaran, dalam program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terdapat 1.506 mata kegiatan dengan total anggaran Rp 5,069 triliun. Firdaus mengatakan 828 kegiatan telah terealisasi dengan total nilai belanja Rp 2,325 triliun.

Dari penelusuran ICW, ada 48 mata anggaran kegiatan yang diduga bermasalah. Menurut dia, terdapat daftar penerima anggaran bermasalah sebesar Rp 2,068 triliun. Sedangkan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun dengan 454 paket kegiatan bermasalah. "Maka 51,5 persen realisasi belanja sarana dan prasarana pendidikan memiliki indikasi penyimpangan korupsi," kata Firdaus.

### UPS yang Apes

#### Jumlah paket: 51

- Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan: 49 paket harga Rp 6 miliar per paket
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah: 1 paket harga Rp 6 miliar
- Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng: 1 paket harga Rp 1,37 miliar

#### Kenapa 1 UPS Seharga Rp 6 Miliar?

- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp 4,9 juta
- Dokumen dan administrasi tender: Rp 495 ribu
- Rak: Rp 968 juta
- UPS: Rp 1,92 miliar
- Instalasi listrik: Rp 3,1 miliar

● LINDA